"Mengambil Pelajaran dari Bencana Sistemik Cicak vs Buaya dan Bank Century"*

Gemuruh situasi politik nasional tiba-tiba menjadi panas setelah masyarakat luas terbelalak panca indera dan mata hatinya melihat satu-persatu kasus-kasus besar diungkap.

Bermula dari sebuah usaha bermotif penyelamatan negara dan bangsa, setidaknya itu yang bisa kita tangkap dari perspektif korban, dan jika kita memakai kerangka pemikiran yang positif. Wiliardi, seorang polisi yang tidak perlu kita ragukan baktinya pada negara ini, beserta beberapa pemuda sipil mendapat "tugas negara" untuk mengawasi seorang Nasrudin , seorang dirut salah satu BUMN, yang dilabeli akan membahayakan Negara. Kekacauan terjadi tatkala Nasrudin tewas dan cerita berlanjut ke seorang Antasari Azhar yang dikenai dakwaan berada di belakang pembunuhan tersebut. Status Antasari yang saat itu menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kasus ini masuk ke ranah politik.

Di tempat lain, lewat tengah malam, setahun yang lalu, Boediono, guru besar Ilmu Ekonomi dari Universitas Gajah Mada, yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia bersepakat dengan Menteri Keuangan yang namanya di dunia internasional naik daun saat itu, Ibu Sri Mulyani, untuk menyelematkan perekonomian negara dari dampak sistemik yang dirasa timbul jika Bank Century tidak segera disuntik dana segar. Tapi malangnya Boediono ternyata tidak mencapai kesepakatan dengan pihak lain yang lebih mayoritas.

Dua narasi ini ternyata bersinggungan tatkala konflik Kepolisian RI dan KPK berada di level tertinggi. Mahkamah Konstitusi secara berani memutar bukti rekaman yang ternyata mengeskalasi konflik, dan semua orang mendapat pencerahan, sangat sedikit orang baik di republik ini.

Kejaksaan, Kepolisian bertikai melawan KPK, di pihak lain kasus penyaluran uang penyelamat sebesar 6,7 triliun rupian membawa sensifitas luar biasa pada level masyarakat dan elit politik. Masyarakat menuntut keadilan yang belum bisa diberikan apparatus pemerintahan saat ini. Figur-figur yang dizalimi oleh ketidakadilan sontak menjadi simbol perlawanan masyarakat yang sudah muak mendengar para megalomaniak kekuasaan merebut sumber daya yang seharusnya menjadi instrument kesejahteraan rakyat.

Kita masih samar-samar, sampai dimana cerita ini bergulir, atau dimana klimaksnya nanti. Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada senin malam, ternyata malah anti-klimaks, dan menisbikan harapan sebagian besar rakyat Indonesia akan ketegasan dan penyelesaian sengketa antar lembaga

negara. Dewan Perwakilan Rakyat pun mulai galak dan bersiap menjadikan audit BPK sebagai salah satu amunisi resolusi sengketa ini. Sementara itu berbagai scenario dan dugaan konspirasi terus dimunculkan untuk mencapai suatu titik terang.

Semangat zaman inilah yang patut menjadi catatan bagi kita dan perlu kita renungkan sebagai bahan refleksi. Ada banyak kesalahan, ketidakpatutan, kesewenang-wenangan, dan berbagai ketidakadilan yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Karena kebenaran akan lebih sering muncul dari sebuah kesalahan, daripada sebuah kekacauan…

* Pengantar Forum Diskusi Perhimpunan Pustaka Lewi (28/11/2009)